

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS DI KABUPATEN GRESIK TAHUN
1994-2013)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Abdullah Muid
115020113111006**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

**Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(Studi Kasus Pada Kabupaten Gresik Tahun 1994-2013)**

Abdullah Muid

Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email : muid_doel@yahoo.co.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah harus memiliki sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial dan dapat dikembangkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik (periode 1994-2013), serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah era otonomi daerah di Kabupaten Gresik.

Hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel PDRB dan penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik, PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai PDRB sebesar 0,002 terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya, PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD dikarenakan PDRB menggambarkan Sembilan sektor hasil perekonomian. Jumlah penduduk mempunyai hubungan yang signifikan juga terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik, hal tersebut dapat dilihat sebesar 5,043 itu berarti setiap kenaikan 1 persen Jumlah Penduduk akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,043. Pendapatan Asli Daerah menunjukkan peningkatan yang relatif cepat setelah berlakunya sistem otonomi daerah sesuai dengan analisis deskriptif yang telah dilakukan.

Perlu bagi Daerah Tingkat II untuk meningkatkan kesadaran dan kinerja jajarannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kualitas SDM nya serta mengadakan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerimaan-penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, terutama Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Kata Kunci :

PDRB, Penduduk, Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Menurut Pasal 1 huruf 1 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan inspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum era reformasi harapan pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerahnya sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat dalam hal ini sebagai donatur akibat ketidakberdayaan pendapatan daerah dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Era reformasi memberikan

peluang bagi paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan implikasi yang sangat mendasar yang mengarah pada perlu dilakukannya reformasi sektor publik dan dipakainya paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang selama ini tergantung pada pemberian dana dari pemerintah pusat harus bersiap-siap melakukan strategi pada keuangan daerah dan anggaran daerah. Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah atau yang dapat disebut sebagai pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan biasa diukur dalam jangka waktu satu tahun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dalam pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun 1994-2013

No	Tahun	Penerimaan PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	1994	6.119.347.636,90	-
2	1995	10.234.926.681,18	67,2%
3	1996	17.102.496.707,89	67%
4	1997	14.658.094.862,91	-14,2%
5	1998	14.413.550.162,72	-1,66%
6	1999	18.191.327.569,65	26,2%
7	2000	19.219.729.465,79	5,65%
8	2001	32.464.795.392,47	68,9%
9	2002	50.324.021.762,73	55%
10	2003	59.811.702.093,09	18,8%
11	2004	73.186.337.984,40	22,3%
12	2005	87.961.114.635,71	20,1%
13	2006	101.602.887.680,56	15,5%
14	2007	115.311.154.262,69	13,4%
15	2008	131.822.725.092,80	14,3%
16	2009	168.302.821.579,56	27,6%
17	2010	167.771.869.035,97	-1,68%
18	2011	273.975.992.140,13	63,3%
19	2012	427.588.705.990,55	56,3%
20	2013	502.767.029.904,17	17,5%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gresik (data diolah)

Tabel 1.1 menggambarkan tingkat perkembangan dan pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik yang hampir tiap tahunnya mengalami kenaikan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir. Penerimaan terendah terjadi pada awal tahun pengamatan yaitu tahun 1994, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah karena memang belum maksimalnya peran daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga pemaksimalan penyerapan pendapatan daerah juga minim, yang mengakibatkan pada rendahnya perolehan total PAD. Sedangkan perolehan PAD yang paling besar diperoleh pada tahun 2013, dimana pada tahun tersebut terdapat beberapa perubahan tentang aturan pajak daerah khususnya di kabupaten Gresik, sehingga berpengaruh juga terhadap peningkatan PAD.

Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan perekonomian yang telah dilaksanakan maka sangat diperlukan adanya alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan tersebut. Pendapatan Regional merupakan salah satu indikator berupa data agregat

yang biasanya di pakai oleh banyak Negara termasuk Indonesia guna mengukur tingkat pertumbuhan ekonominya, baik secara nasional (PDB) maupun regional (PDRB). PDRB merupakan suatu data yang dapat memberikan gambaran-gambaran keadaan ekonomi dalam satu wilayah, baik di masa lalu maupun sekarang yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, evaluasi dan target yang akan dicapai pada masa berikutnya.

Produk domestik adalah seluruh produk barang dan jasa serta hasil kegiatan ekonomi yang diproduksi dalam wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk region tersebut. Yang dimaksud wilayah domestik suatu region adalah meliputi wilayah yang berada di dalam batas geografis region tersebut seperti provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu region. Besar kecilnya PDRB suatu daerah dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu Sukirno (2003) berpendapat bahwa besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah.

Selain PDRB yang menjadi barometer pembangunan di bidang ekonomi, faktor lain yaitu penduduk juga dianggap penting sebagai motor penggerak pembangunan. Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Alasannya sederhana, karena penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar pelaksanaan hasil-hasil perencanaan dapat berjalan dengan baik. Menurut Todaro (Wikipedia.org) faktor utama pertumbuhan ekonomi dari suatu Negara yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja yang dimiliki suatu region berarti tingkat produktifitas tenaga kerja juga semakin besar, dengan kata lain semakin banyak tingkat populasi penduduk dalam satu wilayah maka akan dapat meningkatkan potensi pasar domestik wilayah tersebut.

Jaya (1999) dalam Masyuri. Menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan. Dari pernyataan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yang berarti bahwa besarnya pendapatan suatu wilayah dipengaruhi langsung oleh jumlah penduduk, bila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan teori klasik dikemukakan suatu teori yang menjelaskan kaitan antara pendapatan per kapita dengan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimal. Dari teori pertumbuhan klasik telah dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita, maka penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita, akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi. Oleh karenanya pendapatan perkapita akan mengalami perlambatan pertumbuhannya. Menurut Sukirno (1999:431) Penduduk yang bertambah terus akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk tertentu yang produksi marginalnya telah sama dengan pendapatan perkapita. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai maksimal,

Kabupaten Gresik sebagai salah satu kabupaten yang sangat maju pesat perkembangan industrinya dan juga merupakan salah satu kabupaten industri utama di Jawa Timur. Banyak perusahaan-perusahaan baik perusahaan yang berskala besar maupun perusahaan berskala kecil berada di Kabupaten Gresik, diantaranya adalah terdapat dua perusahaan besar milik Negara/BUMN seperti PT. Petrokimia Gresik dan PT. Semen Gresik. Kabupaten Gresik juga memiliki beberapa kawasan industri diantaranya adalah Kawasan Industri Gresik (KIG) dan Kawasan Industri Maspion. Perlu diketahui bahwa kawasan tersebut terdapat perusahaan-perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri yang mengembangkan usahanya di kawasan tersebut. Oleh karena itu dengan banyaknya perusahaan-perusahaan baik berskala besar maupun kecil yang beroperasi di kabupaten Gresik diharapkan dapat meningkatkan tingkat produktivitas PDRB daerah. Selain daripada itu harapan lainnya adalah berupa penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, karena sudah bekerja maka pendapatan penduduk akan mengalami peningkatan, yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun 1994-2013 ?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun 1994-2013 ?
3. Bagaimana perbedaan pendapatan asli daerah (PAD) ketika sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah Kabupaten Gresik ?

B. KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah (Wikipedia.org).

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang tersebut bahwa sesungguhnya pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten/kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pembiayaan pembangunan suatu daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan dunia internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting, karena bagaimana pun peningkatan dalam penerimaan PAD akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim dalam penelitian Fitriana (2014:1880), PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik bersumber dari:

Pajak Daerah;

Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah;

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah adalah berasal dari retribusi daerah, Akan tetapi dalam retribusi tiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda satu sama lain, sehingga tiap-tiap daerah harus jeli melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan daerah tersebut dalam menggali penerimaan retribusi untuk menunjang penerimaan. Menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil dari beberapa aktifitas penduduk yang diharuskan dan wajib untuk membayar besaran pemungutan dari daerah, misalnya saja hasil pengelolaan daerah berupa perusahaan daerah yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM, ketika penduduk maupun perusahaan yang menggunakan fasilitas air bersih maka diharuskan membayar besaran biaya yang telah ditetapkan kepada PDAM tersebut karena telah memakai fasilitas langganan air.

Lain-lain PAD yang sah.

Sumber pendapatan asli daerah yang terakhir atau yang ke empat adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan yang didapat dari beberapa hasil dari aktifitas kedinasan pemerintah daerah misalnya saja penjualan kendaraan dinas maupun fasilitas-fasilitas perkantoran yang sudah tidak terpakai, selain itu terdapat pula dari hasil sisa bahan atau tempat bahan yang tidak terpakai dari pembangunan publik yaitu jalan raya dan lain sebagainya.

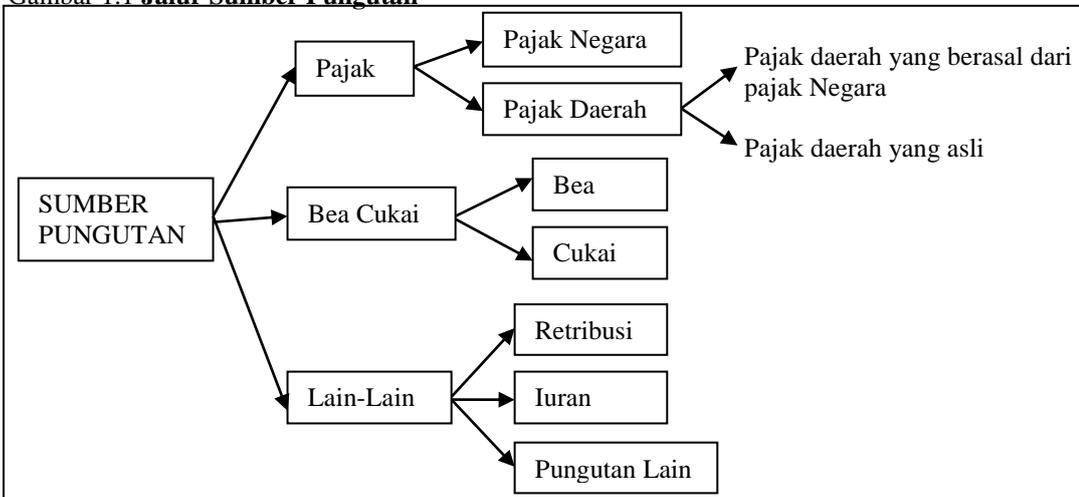
Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap PAD

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah di yakini masih merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Miller dan Russex (1997), dalam Ismail Hasan yang meneliti tentang pengaruh struktur fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di Amerika Serikat, mengatakan bahwa, *pertama*: peningkatan surplus anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, bila pengeluaran untuk pendidikan atau transportasi publik dapat ditekan atau *corporate income tax* ditingkatkan, *kedua*: apabila *sales tax* dan pajak lainnya digunakan untuk *transfer payment*, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, tapi apabila *corporate income tax* digunakan untuk *transfer payment* maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, *ketiga*: pajak akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila penerimaan Negara digunakan untuk membiayai pendidikan, transportasi publik dan keamanan publik.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Pentingnya variabel jumlah penduduk terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor penerimaan pajak dan retribusi suatu daerah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Norfidwitya dalam susanto (2014:27) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk, besar kecilnya pendapatan dapat di pengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima akan meningkat. Jelas sekali bahwa dari pernyataan tersebut dapat mewakili penjelasan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak maupun retribusi yang akan diperoleh suatu daerah ditentukan oleh seberapa besar jumlah penduduk, pendapatan dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu jumlah penduduk berperan besar dalam hal meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak maupun retribusi dari daerah tersebut.

Gambar 1.1 Jalur Sumber Pungutan



Sumber : Kartasapoetra, Komaruddin dan Rience Kartasapoetra

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Menurut Suandy (2003:5) Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni *pertama*, Pajak Langsung (*direct tax*), maksud dari pengertian tersebut adalah bahwa pajak ini dikenakan atas masuknya aliran sumber daya penghasilan, dan biasanya beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan yang *kedua*, Pajak Tidak Langsung (*indirect tax*) adalah dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa, dan biasanya beban pajak tidak langsung ini ditanggung oleh masyarakat. Dari penjelasan gambar dan deskripsi diatas maka fungsi penduduk atau hubungan penduduk secara langsung terhadap pendapatan asli daerah adalah bahwa penduduk dalam hal ini merupakan objek pajak, sehingga semakin banyak penduduk dalam suatu daerah maka semakin besar pula penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah.

C. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif, yaitu teknik pengolahan data dimana data-data yang berbentuk angka diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung dengan rumus-rumus yang relevan. Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gresik di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Gresik, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial (DISPENDUKCAPILSOS) Kabupaten Gresik di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 17 Gresik, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik di Jalan R. A. Kartini No. 154 Gresik. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian pada Dinas tersebut karena data penunjang untuk penelitiannya berada di dinas tersebut. Periode waktu penelitian ini dimulai pada tahun anggaran 1994 sampai dengan tahun anggaran 2013.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi data PDRB, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gresik. Menurut Sugiyono (2004:129) sumber sekunder yang dimaksud bahwa secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia di buku-buku, jurnal, majalah dan sumber lainnyayang secara tidak langsung berhubungan dengan penelitian.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Proses analisis data merupakan usaha untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu: uji Hipotesis diantaranya adalah Analisis Determinasi (R^2), uji t dan uji F. selain itu penelitian ini juga menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dan Analisis Deskriptif Kuantitatif untuk menguji otonomi daerah

Persaman regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

- Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X_1 = PDRB
- X_2 = Jumlah Penduduk
- β_0 = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien Regresi
- e = Error

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai PDRB dan Jumlah Penduduk serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik dengan tahun pengamatan 1994-2013. Data sekunder yang diambil dari berbagai instansi tidak langsung diinput kedalam perhitungan, akan tetapi sebagian diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk Logaritma dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X + \beta_3 X + e \quad (1)$$

$$\text{Log}_Y = \beta_1 + \beta_2 \text{Log}_X + \beta_3 \text{Log}_X + e \quad (2)$$

Model pertama menjelaskan bahwa pengaruh perubahan satu unit X, maka akan berdampak pada perubahan Y yang dilihat dari nilai β_2 . Sedangkan pada model kedua menerangkan setiap perubahan X akan mengakibatkan perubahan pada β_2 juta terhadap Y. Dengan menggunakan permodelan Log maka hubungan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen digunakan satuan juta. Model persamaan dari variabel dependen maupun independen yang dilakukan transformasi data adalah PAD, PDRB, dan Penduduk. Dari penjelasan tersebut dapat diperoleh hasil pengujian regresi sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 1.2 Hasil Estimasi LogPDRB, LogPenduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik

Source	SS	df	MS			
Model	30.1369481	2	15.068474	Number of obs =	20	
Residual	1.18377855	17	.069634032	F(2, 17) =	216.40	
				Prob > F =	0.0000	
				R-squared =	0.9622	
				Adj R-squared =	0.9578	
				Root MSE =	.26388	
Total	31.3207266	19	1.6484593			

lnpendapat~h	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
lnpdrbatas~n	.6579905	.1819046	3.62	0.002	.2742054	1.041776
lnjumlahpe~k	5.897358	.9370929	6.29	0.000	3.920264	7.874451
_cons	-26.81753	4.174997	-6.42	0.000	-35.626	-18.00906

Sumber : Data Sekunder 1994-2013 (diolah) stata10

Uji R-Squared

Pada tabel 2.1, koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9622 atau 96,22% nilai tersebut mendekati 100%, artinya bahwa variabel LogPDRB, dan LogPenduduk di Kabupaten Gresik mampu menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (LogPAD) Kabupaten Gresik sebesar 96,22 persen dan sisanya 0.0378 atau 3,78 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi.

Uji F

Pada nilai Probabilitas F-statistik yaitu sebesar 0.0000 yang mana jauh lebih kecil daripada 0,10, maka hal tersebut menjelaskan bahwa variabel independen dari variabel LogPDRB, dan LogPenduduk secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu PAD Kabupaten Gresik.

Uji t

Uji t digunakan untuk menjelaskan pengaruh secara individual atau parsial dari variabel independen, yaitu variabel LogPDRB, dan LogPenduduk. Diketahui bahwa jika nilai probabilitas variabel independen kurang dari 0,10 atau 10%, maka variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Berdasarkan tabel 4.6 diatas bahwa nilai probabilitas dari variabel independen LogPDRB sebesar 0.002 dan nilai probabilitas LogPenduduk sebesar 0.000, yang artinya bahwa nilai keduanya dari variabel independen tersebut kurang dari 10% atau dibawah 10%, maka dapat diartikan bahwa kedua variabel independen (PDRB dan Penduduk) tersebut berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen (PAD).

Setelah diperoleh estimasi dengan regresi linear berganda, maka hasil estimasinya sebagai berikut:

$$\text{LogPAD} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPDRB} + \beta_2 \text{LogPenduduk} + e$$

$$\text{LogPAD} = -26.81753 + 0.6579905 \text{LogPDRB} + 5.897358 \text{LogPenduduk} + e$$

Tabel 1.3 Hasil Estimasi Regresi

Variabel	Koefisien	Signifikansi	Hubungan
PDRB Atas Harga Konstan	0.6579905	Signifikan	Positif (+)
Jumlah Penduduk	5.897358	Signifikan	Positif (+)

Sumber : Hasil Output Stata10

Berdasarkan tabel 1.3 diatas variabel PDRB atas harga konstan memiliki koefisien sebesar 0.6579905 dan memiliki hubungan signifikan positif. Hasil tersebut dapat menjelaskan bahwa PDRB memang memiliki pengaruh yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik. PDRB akan mempunyai peran rill dalam peningkatan perolehan PAD dan sekaligus menjadi

stimulus bagi perekonomian daerah apabila benar-benar terealisasi dengan maksimal. Dengan demikian, maka seharusnya PDRB dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk Kabupaten Gresik.

Peran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan daerah berupa pembangunan infrastruktur dasar (misalnya pembangunan jalan, jembatan, sekolah, pelabuhan maupun infrastruktur penunjang lainnya) dan juga penyediaan fasilitas publik seperti dibidang kesehatan dan pendidikan. Semakin meningkatnya sektor PDRB dalam perekonomian maka secara otomatis akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah sekaligus akan menambah pendapatan daerah, ketika kegiatan ekonomi daerah meningkat, maka akan membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran yang pada akhirnya akan menambah pendapatan masyarakat, yang kemudian akan diikuti oleh kenaikan tingkat konsumsi. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong peningkatan produksi, dan dampak *multiple effect* ini akan semakin meningkat dan berkelanjutan, maka hasilnya dapat dilihat kemudian adalah pengangguran dapat diatasi, kemiskinan diturunkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Indra (2001) dalam penelitiannya bahwa PDRB atas dasar harga konstan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Menurutnya dengan kuatnya sektor PDRB di suatu daerah maka sumbangan sektor tersebut akan berdampak secara besar terhadap kekuatan perekonomian daerah. Sehingga hasil, manfaat dan dampaknya dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak bagi masyarakat sekitar.

Variabel yang memiliki hubungan signifikan dan positif selanjutnya adalah jumlah penduduk, dimana variabel jumlah penduduk memiliki koefisien sebesar 5.897358. Penduduk berperan dalam perekonomian, sesuai asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang tinggi, didukung oleh pertumbuhan ekonomi meningkat dan akan diikuti oleh PDRB per kapita yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat sekaligus peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Sehingga pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada penduduk tersebut juga naik, hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi, sehingga dengan meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi akan menyebabkan peningkatan PAD yang selanjutnya berimplikasi pada peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Usia produktif adalah erat kaitannya dengan penduduk yang sudah berusia di antara 15-59 tahun, artinya bahwa penduduk yang sudah berusia di antara tersebut, diasumsikan memiliki kemampuan, keuletan, produktifitas, dan cara berfikir yang lebih kedepan dibandingkan penduduk yang belum berusia produktif, sedangkan bagi penduduk yang usianya sudah melebihi usia produktif atau usia lanjut diasumsikan masih memiliki kemampuan dan keuletan, akan tetapi tingkat produktifitas dan konsentrasi penduduk tersebut mulai menurun, sehingga daerah yang memiliki jumlah penduduk produktifnya tinggi dapat dikatakan bahwa tingkat produktifitas dalam daerah tersebut juga tinggi.

Tabel 1.4 Penduduk 15 Tahun Ke Atas Bekerja Menurut Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 1994-2013

No	Jenis Kelamin Laki-Laki Dan Perempuan					Jumlah
	Kelompok Umur/Tahun	15-29	30-44	45-59	60+	
1	1994	*	*	*	*	*
2	1995	*	*	*	*	*
3	1996	101.157	176.591	104.115	26.569	395.432
4	1997	105.203	155.197	125.576	29.819	421.573
5	1998	100.314	201.977	105.502	30.326	438.119
6	1999	116.008	202.667	101.280	31.460	451.415
7	2000	121.415	215.314	101.873	30.320	468.922
8	2001	125.101	221.184	130.431	31.915	508.531
9	2002	127.743	229.464	129.312	33.630	520.150
10	2003	133.386	231.265	141.640	34.597	541.720
11	2004	146.376	235.654	131.287	34.306	547.623

12	2005	149.401	239.432	150.100	37.495	576.428
13	2006	150.317	237.129	152.042	40.502	579.990
14	2007	147.021	242.096	146.252	43.016	578.385
15	2008	148.831	244.654	147.768	44.156	585.409
16	2009	141.736	264.180	139.701	39.106	584.722
17	2010	167.869	240.339	144.117	34.594	586.919
18	2011	170.237	247.622	148.958	45.256	612.073
19	2012	165.376	267.254	141.287	38.306	612.223
20	2013	161.830	270.194	140.828	39.469	612.321

Sumber : Gresik Dalam Angka (data diolah), * = Tidak dilakukan pencatatan dalam GDA

Dari tabel 1.4 diatas merupakan data penduduk usia 15 sampai dengan usia 59 tahun yang bekerja di Kabupaten Gresik. Penduduk yang sudah bekerja berarti sudah memiliki penghasilan pribadi, memiliki kemampuan untuk membiayai atau memenuhi kehidupannya sendiri, meskipun penduduk tersebut masih berusia muda, sehingga penduduk tersebut juga memiliki kemampuan untuk konsumsi tanpa harus bergantung kepada orang lain. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah yang bekerja, maka rata-rata pendapatan per kapita penduduk di daerah tersebut juga semakin besar, sehingga dengan pendapatan perkapita yang cenderung tinggi, maka kemampuan penduduk tersebut untuk membelanjakan uang mereka juga semakin besar.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hasanudin (2011), bahwa dalam penelitiannya penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hasil yang diperolehnya bahwa koefisien jumlah penduduk sebesar 8476200 yang mengindikasikan bahwa jika terjadi kenaikan jumlah penduduk satu satuan, maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp. 8.476.200 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik. Hal tersebut dikarenakan PDRB merupakan gabungan dari sembilan sektor penggerak perekonomian daerah, adapun sektor yang paling besar pengaruhnya terhadap besaran PDRB harga konstan tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan, hal ini dikarenakan Kabupaten Gresik merupakan pusat industri di Jawa Timur. Maka dari itulah kenapa PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik.

Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk Kabupaten Gresik merupakan penduduk usia kerja/produktif, apalagi jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan, sehingga produktifitasnya juga lebih besar, karena tingkat produktifitasnya besar sehingga rata-rata pendapatan yang mereka peroleh juga besar, sehingga pajak yang dibebankan kepada mereka juga besar. Oleh karenanya tidak heran jika jumlah penduduk Kabupaten Gresik memiliki hubungan yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Gresik memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD dan kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum ada perbedaan penerimaan pendapatan asli daerah yang signifikan antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Gresik berusaha untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dan jenis penerimaan lainnya.

Saran

Setelah melakukan serangkaian pengujian dan pembahasan mengenai factor yang mempengaruhi PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta setelah melakukan Uji Deskriptif tentang Era Otonomi Daerah dan Era Sebelum Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik. Berikut ini saran yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

Pemerintah daerah perlu melakukan pembaharuan sektor PDRB yang memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan, diantaranya seperti subsektor pertanian dan subsektor perdagangan, hotel dan restoran. Sehingga jika kedua sektor tersebut dapat ditingkatkan lagi maka kontribusi PDRB terhadap PAD Kabupaten Gresik juga akan semakin meningkat.

Kabupaten Gresik memiliki jumlah penduduk yang lumayan besar, terutama jumlah kelahiran bayi, hal tersebut akhirnya akan menambah beban pemerintah seperti anggaran kesehatan. sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah yang ketat agar jumlah kelahiran di Kabupaten Gresik dapat ditekan. Jumlah penduduk Kabupaten Gresik besar yang belum tergarap dengan maksimal, sehingga tugas pemerintah daerah Kabupaten Gresik adalah memberikan pengarahannya atau pelatihan-pelatihan kewirausahaan maupun kerjasama kemitraan dengan penduduk Kabupaten Gresik supaya dapat meningkatkan kegiatan perekonomian daerah, yang pada akhirnya menumbuhkan pendapatan masyarakat, sehingga pajak yang diperoleh pemerintah Kabupaten Gresik meningkat.

Adanya otonomi daerah seharusnya bisa dijadikan jalan bagi pemerintah Kabupaten Gresik untuk dapat lebih meningkatkan lagi potensi-potensi yang sejauh ini belum tergarap maksimal yang dimiliki Kabupaten Gresik, seperti penyederhanaan dan kemudahan dalam mengurus segala jenis perijinan investasi, pemerataan pembangunan infrastruktur sehingga keseluruhan masyarakat Kabupaten Gresik dapat menikmatinya, yang selanjutnya dapat memperlancar kegiatan perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari. Tunggul S. N. 2005. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang. Penerbit Bayumedia.
- Bastian, Indra. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Penerbit BPFE.
- Budi Santoso. Purbayu dan Retno Puji Rahayu. 2005. Analisis pendapatan Asli Daerah (PAD) DAN Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol. 2, No. 1/ Juli 2005 : 9-18
- Chakim, Ali. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. Tesis. Program Pasca Sarjana. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Elita. 2007. *Penerimaan-penerimaan Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta. Penerbit Rajawali.
- Fitriana. 2014. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No. 2 : 1875-1888
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi dan Analisis Multivariat dengan Proses SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gresik Dalam Angka (*Gresik in Figure*) Tahun 2000-2013.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit UUP AMP YKPN.
- Hariyudha, Reza. 2009. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Usaha, Pertumbuhan PDRB Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (studi kasus di kota Kediri). Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Malang.
- Hasan, Ismail. 2011. Analisis Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah, PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandar Lampung. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasanudin, Mohammad. 2011. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Kendal, Demak, Kudus Dan Kota Semarang Tahun 2001-2008. Jurusan Akuntansi. Politeknik Negeri Semarang.
- Kartasapoetra. Komaruddin dan Kartasapoetra, Rience. 1989. *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jakarta. Penerbit Bina Aksara.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Masyhuri. 2007. Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin. Tesis. Perencanaan Pembangunan, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- Perencanaan Tenaga Kerja Nasional Tahun 1996. Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jakarta.
- Prayudha Rusetya, Andhika. 2008. Analisis Perbandingan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Sebelum Dan Sesudah Adanya Perubahan Undang-Undang Pajak Tahun 2000. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Malang.
- Republik Indonesia. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribudi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Rosyidi, Suherman. 2005. *Pengantar Teori Ekonomi (pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro)*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Saberan, H. 2002. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta. Penerbit Rajawali.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Penerbit Rajawali.
- Suandy, Erly. 2003. *Perencanaan Pajak*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta.
- Susanto, Iwan. 2014. Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus kota malang tahun 1998-2012). Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Malang.
- Syahrial dan Munzir. 2007. Peranan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dispenda Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ekonis*. Vol. 4, No. 2/Agustus 2007 : 71-86.
- Widodo A. S. dan Jimly Asshiddiqie. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Cetakan Pertama.
- http://id.wikipedia.org/wiki/2015/Otonomi_daerah/21/01/2015.
- <http://hariscompwt.blogspot.com/2013/03/uji-spearman-untuk-heteroskedastisitas.html/04/04/2015>.
- <http://gresikkab.bps.go.id/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin/13/06/2015>.
- <http://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-statistik-deskriptif-spss.html/04/04/2015>.